

## **PERANAN TATA PEMERINTAHAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA MAGELANG 1906-1942**

Oleh: Didi Hariyanto Purnomo  
NIM. 11407144007

### **Abstrak**

Tata pemerintahan yang diberlakukan di Kota Magelang secara umum telah membuat perubahan dalam kota. Perkembangan pesat yang terjadi pada wujud kota tak lepas dari kekuasaan *gemeente* yang telah mendukung kebijakan-kebijakan dalam pembangunan kota. Letak geografis Kota Magelang yang dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Merapi kondisi ini sangat strategis bagi keberadaan sebuah pemukiman. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses terbentuknya *Gemeente* Magelang dan mengkaji mengenai bagaimana dampak yang muncul dari adanya tata Pemerintahan *Gemeente* terhadap perkembangan Kota Magelang 1906-1942.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. *Pertama*, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah sejaman yang dilakukan dengan menelusuri dokumen tertulis. *Kedua*, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik maupun isi sumber. *Ketiga*, interpretasi yaitu mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. *Keempat*, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian hasil penelitian dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Magelang merupakan sebuah kota modern yang telah muncul sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Kota Magelang menjadi salah satu *gemeente* setelah memenuhi beberapa faktor untuk menjadi sebuah kota, yaitu penduduk, keadaan tempat, dan keuangannya. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya keputusan pendirian daerah otonom Magelang yang tercantum dalam *Staatsblad* 1906 No. 125 yang telah membuat Kota Magelang memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur perkembangan kota. Perbaikan demi perbaikan pemerintahan yang dilakukan Kolonial Belanda telah mendorong terjadinya perubahan di Kota Magelang. Dampak dari kekuasaan *gemeente* tidak hanya terasa pada golongan Eropa yang mendominasi kota saja melainkan juga masyarakat pribumi dapat menikmati fasilitas seperti: kesehatan, jalan, transportasi hingga pendidikan.

**Kata Kunci:** *Tata Pemerintahan, Perkembangan Kota, Magelang.*

## **THE ROLE OF GOVERNANCE ON MAGELANG CITY DEVELOPMENT 1906-1942**

By:

Didi Hariyanto Purnomo and Danar Widiyanta, M.Hum

### **Abstract**

Governance imposed in Magelang in general has made changes in the city. The rapid development that occurs in the form of the city could not be separated from power municipality that has supported policies in urban development. The geographical location of Magelang city surrounded by mountains such as Sindoro, Cleft, Merbabu and Merapi is very strategic condition for the existence of a settlement. The objective is to determine the formation process Gemeente Magelang and assessing on how impacts arising from the planning to the development of the City Government Gemeente Magelang 1906-1942.

This study uses historical research. First, the heuristic is the stage of data collection or contemporary historical sources is done by tracing the written document. The second source of criticism is the stage of assessment of the authenticity and credibility of the sources obtained by the terms of the physical and content sources. Third, the interpretation that is looking for the meaning of related linkages between facts that have been obtained so that more meaningful. Fourth, historiography, or the writing that is the delivery of research results in the form of historical works.

These results indicate that the city of Magelang is a modern city that has appear since the time of Dutch colonial administration. Magelang city became one municipality after fulfilling several factors to become a city, the population, the state of the place, and finances. It was marked by the release of the establishment of autonomous regions Magelang decision contained in the Government Gazette No. 1906 125 that has made the city of Magelang has broad authority to regulate the development of the city. Improvements were made for the improvement of the Dutch colonial administration has been encouraging change in Magelang. The impact of the municipality power is not only felt in the European group which dominates the town but also the indigenous community facilities such as health, roads, transportation to education.

Keywords: Governance, City Developments, Magelang.

## A. Pendahuluan

Belanda melalui VOC<sup>1</sup> melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap hampir semua kota-kota di Nusantara. Kekuasaan VOC semakin meluas di seluruh Jawa. Pada akhir abad ke-18, kekuasaan VOC berada di daerah-daerah antara lain daerah priangan, dipegang oleh gubernur jenderal di Batavia, sedangkan pengawasan terhadap daerah pesisir dikendalikan oleh gubernur pantai utara-timur Jawa, yang berpusat di Semarang. Selanjutnya, untuk daerah lain yang menjadi *vassal*<sup>2</sup> VOC seperti Banten, Cirebon, dan Jawa Timur, VOC menempatkan residen, komandan (kepala urusan militer), dan pengawas pertanian untuk wilayah keresidenan dan kabupaten. Pada masa VOC, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terbagi dalam 36 kabupaten.<sup>3</sup> Magelang termasuk dalam salah satu daerah di Jawa Tengah yang memperoleh pengaruh kekuasaan VOC.

Daerah-daerah di Nusantara dipaksa mengakui kekuasaan VOC dan tidak diizinkan untuk menjalin hubungan politik serta perdagangan dengan kekuasaan asing selain VOC. VOC melalui para bupati daerah memerintahkan penduduk

---

<sup>1</sup> VOC merupakan singkatan dari *Vereenigde OostIndische Compagnie* (Perusahaan Dagang Hindia Timur), perusahaan dagang ini berasal dari Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Dikalangan orang Indonesia VOC memiliki sebutan Kompeni. Istilah ini diambil dari kata *compagnie* dalam bahasa Belanda. Tetapi rakyat Nusantara lebih mengenal Kompeni sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda.

<sup>2</sup> Sebutan untuk daerah yang berada di bawah kekuasaan VOC. Daerah yang menjadi Vassal VOC harus membantu VOC dalam urusan perang. Meningkatkan perekonomian dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>3</sup> Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (Kuala Lumpur, New York, London, Melbourne: Oxford University Press, 1972), hlm. 93-94.

pribumi untuk mengumpulkan dan menyerahkan produk-produk yang dibutuhkan oleh VOC. Sebagai kompensasi, VOC memberikan beberapa imbalan berupa uang, lahan, maupun jaminan jabatan kepada para bupati. Selanjutnya, untuk menjaga kepatuhan penduduk pribumi agar tidak memberontak kepada para bupati dan VOC, upacara-upacara tradisional tetap dipertahankan dan mereka tetap meneruskan kehidupan sesuai dengan tradisi mereka. Intensifikasi eksploitasi VOC memungkinkan para bupati menerima pendapatan ekstra, sehingga mereka menjadi kaya raya.<sup>4</sup> Selain melaksanakan monopolinya di bidang ekonomi pada wilayah yang berada di bawah kekuasaannya, VOC juga membentuk sistem pemerintah di daerah-daerah.

Setelah masa pemerintahan Daendels, Jawa jatuh ke tangan Inggris dan menjadi bagian daerah kekuasaan Inggris di India. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur jenderal untuk mewakili raja muda Lord Minto, penguasa Inggris di India. Di samping membangun sistem pemerintahan Eropa, Raffles juga tetap mempertahankan sistem pemerintahan pribumi. Raffles menempatkan pegawai-pegawai pribumi di bawah kedudukan bupati dan di bawah pengawasan pemerintah pusat. Bupati dibantu oleh patih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Patih juga bertugas mengawasi kepala-kepala territorial yang lebih rendah yaitu wedana dan asisten wedana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Heather Sutherland, *The Making of Bureaucratic Elite*, a.b. Sunarto, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 6-7.

<sup>5</sup> Heather Sutherland, *op.cit.*, hlm. 9.

Pertengahan abad ke-19, dilakukan pembaharuan pemerintahan Hindia-Belanda dengan *Regerings Reglement* (undang-undang) tahun 1854. Pasal 67 dan 69 undang-undang ini menyatakan, "jika keadaan memungkinkan, penduduk pribumi harus di tempatkan dibawah kepala-kepala daerah mereka sendiri yang ditunjuk dan diakui oleh pemerintah."<sup>6</sup> Dengan demikian, para Bupati harus menampakkan kualitas mereka sebagai pemimpin rakyat. Prestise dan karisma turun-temurun mereka merupakan jaminan untuk merekrut loyalitas rakyat. Pasal 69 undang-undang tahun 1854 ini lebih memperkuat kedudukan bupati secara turun-temurun, "Bupati dipilih oleh gubernur jenderal dari kalangan pribumi dan anak bupati atau keluarganya dapat dipilih jika memenuhi syarat calon bupati yaitu memiliki kemampuan, kepandaian, kejujuran dan kesetiaan."<sup>7</sup> Peraturan ini telah memberi status spesial kepada keluarga bupati dan menciptakan *clan* bupati sebagai kelas atas yang biasa disebut dengan ningrat priyayi.<sup>8</sup>

Akhir abad XIX, di kalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran-pemikiran *ethisch* (moral) yang menyerukan kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk memberikan tanggungjawab moral kepada rakyat bumiputera dengan cara meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>9</sup> Pemikiran etik dari kaum liberal Belanda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah wacana penerapan sistem

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Heather Sutherland, "The Priyayi" dalam *Indonesia*, 19 April 1975, hlm. 70-76.

<sup>9</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 51.

desentralisasi di Nusantara. Di sisi lain, wacana penerapan desentralisasi bagi Belanda merupakan solusi praktis untuk memuluskan kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. Pada akhir abad ke-19, kebutuhan Belanda terhadap fasilitas-fasilitas daerah telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan pabrik-pabrik, serta fasilitas-fasilitas transportasi seperti kereta api dan pelabuhan. Urusan-urusan tersebut memerlukan sejumlah dana untuk melakukan pengelolaan daerah yang membutuhkan pengambilan keputusan dan penanganan secara cepat.<sup>10</sup> Jika residen harus melaporkan setiap urusan kepada gubernur jenderal di *Buitenzorg* (Bogor), hal itu akan menjadi hambatan bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, masyarakat di daerah-daerah menginginkan untuk dapat mempunyai suara dalam urusan-urusan pemerintah<sup>11</sup> yang dapat diwujudkan jika sistem desentralisasi diterapkan.

Awal abad ke 20, terjadi perubahan dalam sistem politik kolonial Belanda di Indonesia sehingga dirasa perlu adanya perubahan sistem pemerintahan. Sistem lama yaitu pemerintahan sentralistik sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Perubahan ini disebabkan oleh sistem dan keadaan aparat Pemerintah Hindia Belanda sendiri dan juga dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di kota-kota. Sistem pemerintahan yang terpusat dirasakan sudah tidak memadai, terutama untuk daerah perkotaan yang semakin berkembang menjadi besar dalam waktu relatif singkat.

---

<sup>10</sup> Darmiati, *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*, (Jakarta: ANRI, 1998), hlm. Xiii.

<sup>11</sup> W.F. Wertheim, *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology* (The Hague: W. van Hoeve Ltd., 1958), hlm. viii.

## **B. Kondisi Kota Magelang Sebelum *gemeente***

Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata suatu daerah terhadap daerah lainnya, Kota Magelang terletak di antara jalur dari bagian selatan menuju bagian utara Pulau Jawa. Posisi Kota Magelang sangat strategis dan penting kaitannya dengan perekonomian, yaitu berada di persimpangan lalu lintas di Jawa Tengah. Letak geografis Magelang menentukan masa depan daerah untuk menuju ke arah kemajuan. Robert Kaplan menuturkan bahwa geografi secara luas akan menjadi determinan yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih daripada yang pernah terjadi sebelumnya.

Pada awalnya Magelang hanyalah nama desa kecil yang di dalamnya terdiri atas beberapa kampung, yaitu kampung Dukuh, Boton Kopen, Boton Balong dan Mateseh. Letak desa ini dibatasi oleh Desa Potrobangsari di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Samban, kemudian Desa Cacaban di sebelah selatan dan Sungai Progo di sebelah barat.<sup>12</sup>

Sejarah Kota Magelang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Karesidenan Kedu. Kedu merupakan wilayah yang berada di Jawa Tengah. Kondisi wilayah Kedu yang strategis baik dari segi posisinya maupun bentang alamnya. Kata Kedu diperkirakan berasal dari kata *kedung* yang artinya mendalam yang menandakan suatu tempat yang dalam di antara pegunungan yang ada di

---

<sup>12</sup> Soekimin Adiwiratmoko, *Magelang Kota Harapan*, (t.p, 1984), hlm. 5.

sekelilingnya.<sup>13</sup> Kawasan kedu berada di antara beberapa gunung yang mengelilinginya dengan begitu memberikan keuntungan bagi penduduk yang tinggal disekitarnya. Hal ini dikarenakan wilayah ini juga berada di antara aliran air dan lembah yang luas. Air-air ini yang memberikan kesuburan bagi ribuan hektar lahan yang berada di sekitar gunung berapi yang membuat tanahnya menjadi produktif. Tidak mengherankan jika semenjak dahulu daerah ini telah didiami oleh masyarakat.

Letak geografis Kota Magelang yang dikelilingi oleh perkebunan teh, nila, tebu, dan tembakau sangat menarik perhatian pengusaha swasta. Kondisi cuaca serta udara yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah membuat semakin banyak orang Eropa khususnya Belanda yang tinggal dan menetap di Magelang.<sup>14</sup>

Pada tahun 1807, wilayah Kedu menjadi bagian dari wilayah penguasaan Pemerintahan Belanda. Sebab, adanya konfrontasi antara pihak Belanda dan Sultan Hamengkubuwono II yang dimenangkan oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, Magelang menjadi bagian daerah Mancanegaraan pada tahun 1812. Sebelumnya, Magelang ditetapkan menjadi pusat pemerintahan dengan kedudukan setingkat kabupaten oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1811. Bupati pertamanya adalah Mas Ngabehi Danoekromo dan diakui oleh Pemerintah

---

<sup>13</sup>Sadma Wahyu D, dkk, *Dokumentasi Sejarah Kota Magelang*, (Magelang: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2013), hlm. 1.

<sup>14</sup> Indah Tri Lestari, "Pariwisata di Magelang Pada Masa Kolonial (1926-1942)", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 31.



Kolonial Belanda dengan gelar Raden Tumenggung Danoeningrat.<sup>15</sup> Pengukuhan ini tercantum dalam besluit *Gubernemen* pada 30 November 1813.<sup>16</sup>

### **C. Terbentuknya *Gemeente* Magelang 1906**

Berdirinya *Gemeente* Magelang pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *staatsblad* No. 125 tahun 1906. Adapun apa yang menjadi latar belakang politik sehingga pemerintah Hindia Belanda melaksanakan asas desentralisasi di Hindia Belanda menurut Amrah Muslimin, sebagai berikut:

Sebagai reaksi atas exes-exes yang timbul karena *cultuur-stelsel* yang mengakibatkan pemerasan tenaga rakyat Indonesia dalam tanam paksa, yang memberikan hasil bumi untuk Pemerintah Belanda untuk dijual di pasaran dunia, sehingga menimbulkan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan rakyat Belanda, timbul gerakan di negeri Belanda di antara orang-orang Belanda yang progressif, untuk mengembalikan, biarpun tidak dalam bentuk yang kontan, hutang moral (*ereschuld*) dari negeri Belanda, terdiri dari keuntungan yang didapat dari pelaksanaan *cultuur-stelsel* kepada rakyat Indonesia.<sup>17</sup>

Kebijakan untuk menjadikan daerah-daerah di Jawa sebagai daerah kotapraja yang dimulai dari kota Batavia lalu kemudian Magelang didasarkan pada tiga faktor yang biasanya menjadi pertimbangan bagi pemerintahan kolonial untuk menentukan berdirinya suatu *gemeente*, yaitu faktor penduduk kulit putih sebagai persyaratan minimal terdapat 10% orang kulit putih yang bertempat tinggal di daerah tersebut, potensi-potensi wilayah setempat, dan keuangan.

---

<sup>15</sup> Haryadi, dkk, *Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah Pendataan Bangunan Indis Kota Magelang*, (Magelang: Tidak terbit, 2001), hlm. 4.

<sup>16</sup> *Middlepunt van den Tuin van Java*.

<sup>17</sup> Amrah Muslimin, *Ichthisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958* (Djakarta: Penerbit Djambatan, 1960) hlm. 8-9.

Magelang, sebagai kajian utama dalam penelitian ini bila dicermati sungguh-sungguh ketiga faktor tersebut memang dimiliki oleh Kota Magelang walaupun hal yang sedemikian ini tidak luput dari nuansa politis Pemerintahan Kolonial Belanda dalam menetapkan suatu daerah menjadi *gemeente*.

Ada beberapa orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Kotapraja Magelang<sup>18</sup>:

<b>Tahun</b>	<b>Kepala Pemerintahan</b>	<b>Nama</b>
1906-1929	Asisten Residen merangkap Dewan Wilayah	1. Ter Mullen 2. J. De Vries 3. J. M. Jordan 4. Gordon 5. C. A. Shinitaler 6. P. M. Letterie 7. J. De Vries
1929-1942	<i>Burgemeester</i> atau walikota	8. J. De Vries 9. Ir. R. Voorman 10. P. K. Lakeman 11. H. F. Brune 12. Ir. R. C. A. P. I. Nessel

#### **D. Perkembangan Kota Magelang 1906-1942**

Pada Kota Magelang sendiri dengan adanya perubahan tatanan pemerintahan telah berpengaruh terhadap mekanisme kerja di tingkat lokal. Hal ini, sejalan dengan tujuan dilaksanakannya desentralisasi di Hindia Belanda. Perkembangan yang terjadi terhadap perpolitikan di Kota Magelang telah mendorong dibentuknya seperangkat jabatan untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan bidang kerjanya. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan pelayanan dalam beberapa sektor, seperti: Pembangunan fasilitas kesehatan di Kota Magelang, seperti Rumah Sakit Jiwa sekarang menjadi Rumah Sakit Dr.

---

<sup>18</sup> Diolah dari Dokumentasi Sejarah Kota Magelang.

Soeroyo yang dibangun tahun 1920 di *grote weg noord* (sekarang daerah kramat); rumah sakit umum yang terletak di daerah Tidar (sekarang menjadi RSU Tidar); Rumah Sakit Militer (Sekarang menjadi RST) yang dibangun tahun 1874 terletak di sebelah timur kompleks militer; Rumah Sakit Paru di Kwarasan (sekarang menjadi BKPM dan dipindahkan di jalan Jendral Sudirman no. 46 B Kota Magelang) yang dibangun tahun 1939; tahun 1939 didirikan Poliklinik Budi Rahayu di Kampung Wates.<sup>19</sup>

Sarana Transportasi utama di Kota Magelang adalah kereta api dan trem dari utara sampai selatan. Magelang terletak di persimpangan jalan raya yang strategis. Jalur Semarang dan Yogyakarta merupakan jalan utama untuk lalu lintas berat membuat distribusi kekayaan dalam dua arah sederhana dan murah. Di pusat Kota Magelang<sup>20</sup> terdapat stasiun kota yang berfungsi menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang dagangan. Beberapa tempat pemberhentian sekitar Kota Magelang seperti: Blondo, Semen, Kota Magelang, Blabak hingga Salam.<sup>21</sup>

Pada tahun 1938-1939, Pemerintah Belanda melakukan pembenahan dan pengaspalan perkampungan yang disertai dengan saluran air untuk dialirkan ke kota untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang kesehatan karena menyebabkan masyarakat tidak terkena sakit dan menerapkan pola hidup sehat.

---

<sup>19</sup> *Kolonial Verslag tahun 1940*, hlm. 29.

<sup>20</sup> Pusat Kota Magelang yang dimaksud adalah daerah sekitar alun-alun.

<sup>21</sup> Afschrift Resident van Kedoe, "*Verboud van Bouwen en Planten ter Plaatse van niet-afgesloten Openbare Overwegen, in den N.I.S. Spoorweg Jogjakarta-Setjang-Willem I-Parakan*", No. 8996/47.

Kota Magelang terbagi menjadi dua zona, yaitu zona kota lama-kota dagang (Magelang Timur) dan zona kota baru-kota *ambtenaren* (Magelang Barat Daya kota). Ini didukung dengan dibuatnya jalan tembus di daerah Jambon-Jambon Kidul-Gladiol.<sup>22</sup>

Pada tahun 1900, berdirilah sebuah perkumpulan Cina yang bernama Tiong Hoa Hwee Koan yang bertujuan membangun sekolah-sekolah Cina.<sup>23</sup> Sekolah Cina di kota Magelang adalah sekolah swasta Cina-Eropa (*Particuliere Hollandsch-Chineesche Scholen*). Pemerintah memberikan dana bantuan untuk sekolah swasta Cina-Eropa sebagai upaya dalam peningkatan pendidikan.

Pendidikan di kalangan Bumiputra umumnya berfokus pada anak-anak pejabat Bumiputra yang dapat bersekolah. Tujuannya untuk mewarisi tugas orang tua mereka sebagai bawahan pemerintah kolonial. Tugas para pejabat dari Bumiputra seperti: pengumpul pajak, penghubung antara pemerintah kolonial dan masyarakat Bumiputra.<sup>24</sup>

Dampak keberadaan pemerintahan *Gemeente* Magelang dalam pendidikan hingga tahun 1920, telah berhasil membangun *Scholen voor Europeesch Onderwijs, Scholen voor Hollandsch-Chineesch Onderwijs, Scholen voor Inlandsch Onderwijs, Scholen voor landbouw, ambachts en visscherij-*

---

<sup>22</sup> Soekimin Adiwiratmoko, *Magelang Kota Harapan*, (Magelang: t.t, 1984), hlm. 23.

<sup>23</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 78.

<sup>24</sup> James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860-1910*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 19.

*onderwijs*.<sup>25</sup> Ini menunjukkan Bumiputra semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Hal inilah yang kelak menjadi suplemen bagi tumbuhnya ide-ide menuju kemerdekaan bangsa.

## **E. Kesimpulan**

Kondisi Kota Magelang merupakan daerah pedalaman yang letaknya strategis di antara jalur Semarang dan Yogyakarta. Potensi alam seperti: letaknya yang strategis berada di jalur transportasi Yogyakarta-Semarang, kondisi daerahnya dikelilingi oleh gunung-gunung membuat Kota Magelang memiliki iklim yang sejuk dan sumber daya alamnya mendukung perkembangan Kota Magelang. Sebelum Magelang dikuasai oleh Belanda masyarakat Kota Magelang pada umumnya merupakan masyarakat tradisional.

Mengamati perkembangan Kota Magelang selama masa pemerintahan *Gemeente*, masyarakat Magelang layak untuk bersyukur karena selama periode pemerintahan tersebut telah banyak melakukan kebijakan yang bermanfaat dan perubahan yang mengarah kepada kemajuan rakyat. Walaupun kita mengetahui yang langsung merasakan dari adanya kebijakan dan perubahan tersebut adalah mereka orang-orang kulit putih yang tinggal menetap di Magelang. Namun masyarakat pribumi pun menikmatinya. Mereka akhirnya mengenal akses jalan yang baik, kesehatan, tata pemerintahan modern, transportasi dengan kereta api dan banyak lagi lainnya.

---

<sup>25</sup> *Burgelijk van Opebare Werken* tahun 1914-1942, No. 2438.

Belum banyak kota-kota di Hindia Belanda yang masyarakatnya sudah bisa menikmati fasilitas kesehatan dan transportasi tetapi masyarakat Kota Magelang sudah biasa ikut menikmatinya. Suatu keberuntungan Magelang dengan segala fasilitasnya telah dipandang oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai sebuah daerah yang layak dijadikan kota bergaya Eropa. Dengan demikian, semua perkembangan yang terjadi pada periode tersebut layak untuk disyukuri.

Konsep desentralisasi yang berujung pada transfer kekuasaan, tanggung jawab dan pengelolaan sumber daya dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah di bawahnya, dalam pelaksanaannya belum berjalan baik. Banyak program-program pembangunan yang dilaksanakan dengan setengah hati, hal ini bisa dilihat dari minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan *gemeente* untuk mendanai semua program pembangunan yang berujung pada ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah pusat. Dalam bayangan orang Belanda masa itu, mungkin apa yang dilakukannya dalam pemerintahan *gemeente* membangun kota-kota di Jawa pada dasarnya mereka sedang melakukan pelestarian-pelestarian penjajahan atas Nusantara karena Penjajah sedang membuat kota-kota tersebut seperti yang ada di negeri Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Terbitan Resmi

ANRI, *Staatsblad van Nederlansch Indie*, 1906, no. 125.

Afschrift Resident van Kedoe, “*Verboud van Bouwen en Planten ter Plaatsse van niet-afgesloten Openbare Overwegen, in den N.I.S. Spoorweg Jogjakarta-Setjang-Willem I-Parakan*, No. 8996/47.

*Burgelijk van Opebare Werken* tahun 1914-1942, No. 2438.

*Kolonial Verslag* tahun 1940.

*Middlepunt van den Tuin van Java*.

### Buku-buku dan Artikel

Amrah Muslimin, *Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Djakarta: Penerbit Djambatan, 1960.

Darmiati, *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*, Jakarta: ANRI, 1998.

Day, Clive, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* Kuala Lumpur, New York, London, Melbourne: Oxford University Press, 1972.

Haryadi, dkk, *Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah Pendataan Bangunan Indis Kota Magelang*, Magelang: Tidak terbit, 2001.

H.M. Nasrudin Anshory, *Bangsa Inlander Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, Yogyakarta: LKIS, 2008.

Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Rush, James R., *Candu Tempo Doeloe Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860-1910*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Sadma Wahyu D, dkk, *Dokumentasi Sejarah Kota Magelang*, Magelang: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2013.

Siraishi, Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Soekimin Adiwiratmoko, *Magelang Kota Harapan*, t.p, 1984.

Susan Blackburn, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*, Jakarta: Masup Jakarta, 2011.

Sutherland, Heather, *The Making of Bureaucratic Elite*, a.b. Sunarto, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Sutherland, Heather, "The Priyayi" dalam *Indonesia*, 19 April 1975.

Van Niel, Robert, *Munculnya Elit Modern Indonesia* Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.

Wertheim, W.F., dkk., *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology* The Hague: W. van Hoeve Ltd., 1958.

### Tesis

Indah Tri Lestari, "Pariwisata di Magelang Pada Masa Kolonial (1926-1942)", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.

Yogyakarta, Oktober 2015

Pembimbing

Reviewer



Danar Widiyanta, M.Hum  
NIP. 19681010 199403 1 001



Miftahuddin, M.Hum  
NIP. 19740302 200312 1 006